

Yordania Sebagai *Middle Income Country* yang Stabil dan Aman

Finna Naila Zulfa

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: 10020220042@student.uinsby.ac.id

Moh. Alfian Kusuma Ardhi

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: 10020220052@student.uinsby.ac.id

Savrila Cilcia Sayidina

Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

E-mail: 10020220064@student.uinsby.ac.id

Abstract

Yordania berdemokrasi dalam sikap pemerintahannya, hal itu ditunjukkan dengan terlibatnya berbagai kelompok dan suku dalam pemerintahan. Suku bedouin merupakan suku yang menopang kerajaan yordania selama ini. Belakangan ini yordania sempat masuk pada kategori negara dengan middle economy country yang stabil bahkan sempat masuk kategori upper middle country berdasar keputusan world bank pada tahun 2016. Bagaimana bisa negara dengan penghasil minyak bumi terendah di timur tengah menjadi negara upper di bidang ekonomi. Artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana kondisi politik ekonomi dan juga perekonomian yordania serta menjelaskan bagaimana yordania masuk ke dalam kategori middle income country yang aman dan stabil. Penulis artikel jurnal menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dalam melakukan penelitian yaitu suatu Teknik yang dipakai guna mendapatkan pengetahuan ataupun kajian pada sebuah studi di satu masa tertentu. Dalam artikel jurnal ini, penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi ekonomi dan politik keamanan di dalam pemerintahan Yordania. Studi pustaka digunakan sebagai Teknik pengumpulan data pada studi ini dimana jurnal terakreditasi, buku, artikel ilmiah serta website lainnya menjadi bahan yang dianalisa. Artikel ini kemudian focus kepada pertanyaan Bagaimana kondisi perekonomian dan politik keamanan Yordania sehingga mampu menjadi middle income country yang aman dan stabil.

Keywords: Yordania, middle income country, ekonomi

Pendahuluan

Suatu negara yang menggunakan system demokrasi di pemerintahan yang mana juga menggunakan system monarki konstitusional berbentuk parlementer dengan seorang raja sebagai kepala negara adalah Yordania. Dalam menjalankan system monarki konstitusionalnya, Yordania menerapkan berbagai nilai demokrasi yang pengaturannya tertuang dalam hukum, serta menghormati HAM dan kebebasan akademik maupun media. Partai politik di Yordania memberi kenaikan tingkat komunikasi diantara pemerintah dan rakyat, serta mewajibkan kontribusinya pada tiap kebijakan pemerintah. Tetapi pada 1950-an, berbagai partai politik Yordania tak berkontribusi dengan maksimal dalam menjalankan pemerintahan. Hubungan antara partai politik dan massa tampak kurang baik pada pengambilan suara, kesigapannya dalam mobilisasi massa di berbagai wilayah, ataupun keberhasilannya dalam pendirian media hingga dekade 1990-an.¹

Nasionalisme menjadi ideologi yang rumbuh dan berkembang di Yordania dimana memunculkan banyak sekali kejadian geopolitik serta keinginan nasionalisme Arab. Nasionalisme kemudian menjadi sebuah dorongan utama guna menumbuhkan kembangkan identitas nasional Yordania. Sebagai negara dengan tingkat perekonomian yang relatif kecil Yordania menghadapi banyak kendala, namun relatif terdiversifikasi dengan baik. Pengiriman uang dari Yordania kepada para pekerja di luar negeri merupakan salah satu sumber utama devisa. Ekonomi Yordania seolah-olah didasarkan pada perusahaan swasta, khususnya jasa namun ternyata pengeluaran pemerintah menyumbang sekitar seperempat dari PDB dan mempekerjakan sekitar sepertiga tenaga kerja. Perkembangan sector ekonomi di Yordania sepanjang ini telah mendapatkan pemasukan per kapita sebanyak \$ 3.500 di 2002. Dilain sisi, GNP Yordania mencapai \$ 16 Biliyun di 2002, maka anggaran belanja Yordania hingga \$ 99,3 Biliyun di 1999. CIA World Factbook menggolongkan Yordania sebagai pasar yang tumbuh didukung kebebasan ekonomi pasar. Dengan begitu Yordania dapat dikatakan sebuah negara yang income perkapitanya menengah atas.²

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini merupakan metode studi pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan memahami berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Penulis juga mengumpulkan berbagai informasi melalui literatur yang membahas mengenai perekonomian Yordania

Politik Keamanan Yordania

Sistem pemerintahan demokrasi tidak di anut di negara Yordania, karena di negara tersebut berupa pemerintahan parlementer maka dari itu sistem yang di anut adalah monarki konstitusional yang mana seorang pemimpin di suatu negara tersebut mendapat julukan seorang raja. Namun nilai-nilai demokrasi tetap dijalankan di negara yordania sesuai dengan hukum yang ada walaupun

mereka menganut sistem monarki konstitusional dalam pemerintahannya, serta yang paling penting menjunjung dengan tinggi HAM serta juga kebebasan akademik. Maka pada konteks ini berbagai kalangan berkepentingan mempunyai kesempatan serta pengaruh yang besar pada penentuan sebuah kebijakan di Yordania. Berbagai kalangan ini dapat memberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya pada kerajaan, walaupun aspirasi yang disampaikan tak sebebas di negara demokrasi.³

Di antara pendukung kerajaan yang paling antusias adalah Bedouin, yang mana juga merupakan suku penopang kerajaan selama ini (tulang punggung rezim Hashemite). Sejak tahun 1920-an serta 1930-an loyalitas dalam suku tersebut sudah dibangun atas dasar hubungan material, saat Petinggi Inggris serta monarki baru dilahirkan mulai mengkoordinasikan berbagai sokongan dari suku setempat dengan pendistribusian perlindungan yang memusat misalnya bantuan pertanian, tanah, serta pelayanan sosial.⁴ Hal ini karena suku pasti berhubungan dengan raja pada masyarakat Yordania. Hubungan ini adalah hasil dari peran kunci berbagai suku untuk memberi dukungan monarki Hashemite. Berbagai suku Baduy dipersepsikan sebagai kaum Hashemite, sebab pemvalidasi raja atas klaim tradisi mengenai agama, hubungan kerabat, serta kinerja seseorang. Disamping itu berbagai suku mendapat keuntungan legitimasi institusionalnya pada proses kebijakan, sebab kinerja raja memiliki kaitan dengan berbagai suku melalui cara-cara tertentu maka akan diklaim sebagai pimpinan sebuah suku. Loyalitas seseorang dalam suku muncul dari kemauannya untuk menegakkan kehormatan suku, raja, serta keluarganya dimana bukan pendapat imajiner mengenai kepatriotisme Yordania. Anggota suku mendapat hak dalam pemerintahan, berdasar anggapan agamanya, dimana memiliki kegunaan ganda sebagai anggapan suku, serta kualifikasi individu sebagai pimpinan sebuah suku. Pada konteks ini bukan sebuah hal yang mengagetkan, berbagai suku tersebut tetap memberi pengaruh yang besar di kerajaan, bahkan saat ini identitas sebuah suku walaupun sudah termodifikasi mulai masa mandate, tetap menjadi pemeran utama pada politik Yordania. Cendekiawan modern Yordania sudah memberi pengakuan atas ikatan khusus diantara berbagai suku dengan monarki Hashemite.⁵ Selain itu, mereka menegaskan di Yordania didapat sentralisasi suku dengan budaya politiknya. Maka dari itu, ada sebutan Haqq al-Dawlah (hak negara) serta al-Haqq al-Asha'iri (hak suku) di Yordania. Maka berbagai suku yang bersangkutan selalu menggunakan hak khusus tersebut guna menjaga serta melindungi kedudukan historisnya. Banyak motif usaha telah mereka upayakan guna tetap mempertahankan eksistensi dalam kerajaan tersebut.

Disadari oleh Yordania bahwa seluruh langkah yang dilaksanakn berbagai suku yang bersangkutan adalah suatu cara menegakkan identitas, kekuasaan dan kekuatan negara agar tak salah langkah yang berakibat banyaknya perpecahan negara dan berbahaya atas keeksisan Hashemite. Maka dari itu

Yordania tak ingin ada perpecahan yang berlanjut dalam negaranya, khususnya keamanan suku pendukung utama golongan Hashemite. Berbagai suku yang bersangkutan jadi pondasi utama rezim, walau banyaknya retorika, rezim tak akan mengkhianati komitmennya pada berbagai suku tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pesanan kursi jabatan tinggi yang rentan bagi orang Transjordan serta pengutamaan bagi Bank Timur dalam pemberian bantuan ekonomi, bahkan sepanjang masa bersatunya 2 bank, kepentingan para suku harus di utamakan oleh monarki Hashemite.⁶

Pada umumnya, yang memiliki peran utama di pemerintah adalah partai politik dimana mengirim preferensi public pada pemegang kebijakan. Saat sukses masuk dalam pemerintahan, golongan atas parpol akan memiliki peranan penting pada saat merumuskan kebijakan. Pada akhirnya, partai memiliki peranan utama dalam mempublikasikan serta menyebarkan kebijakan pemerintah pada rakyatnya. Ringkasnya, partai politik sangat ampuh dalam mengembangkan komunikasi diantara pemerintah dan rakyat. Tetapi di 1950-an berbagai partai politik di Yordania tak berkontribusi secara maksimal dalam menjalankan pemerintahan, Bahkan hingga saat ini, mayoritas partai tersebut gagal menjalankan pemerintahan. Hubungan antara rakyat dan partai politik terlihat lemah, entah keberhasilannya dalam pengambilan suara, kesigapannya dalam mobilisasi massa di berbagai wilayah, hingga keberhasilan pendirian media. Disamping itu mayoritas partai politik tak bisa masuk dengan pemerintah serta memberi pengaruh kebijakannya.⁷ Tentunya hal besar tersebut akibat dari adanya Batasan yang signifikan pada partai politik karena aspek Lembaga, dimana Raja mendapat hak eksklusif yang luas dari umumnya raja konstitusional. Maka menyulitkan partai dalam mendapatkan tongkat kekuasaan dalam pemerintahan, bahkan hanya berupa pemungutan suara yang mampu memberikan pengaruh rezim untuk menetapkan sebuah kebijakan. Saat ini pemerintahan didominasi oleh partai Front Aksi Islam (IAF), yang mana memiliki hubungan erat atas Ikhwanul Muslimin. IAF adalah oposisi yang setia sejak 1992 dimana mengutamakan Teknik reformasi daripada militer serta hingga saat ini menjadi partai politik paling besar dan terstruktur di kerajaan. IAF menjadi pemberontak kebijakan Amerika di daerah tersebut khususnya Irak dan Palestina. Disamping itu juga menolak koalisi normal atas Israel di 1994 serta telah menentukan langkahnya dalam penolakan normalisasi.⁸

Nasionalisme merupakan ideologi yang saat ini berkembang di yordania. Nasionalisme Yordania sebagian besar lahir dari peristiwa geopolitik dan diskusi tentang nasionalisme Arab. Nasionalisme telah menjadi salah satu faktor terpenting dalam perkembangan identitas nasional di Yordania. Namun, konstelasi identitas ini adalah hasil dari momen sejarah tertentu dalam sejarah kerajaan: Pendudukan Israel di Tepi Barat pada tahun 1967, kebangkitan serentak Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) untuk mewakili Palestina, dan perang saudara September Hitam 1970 antara tentara Yordania dan milisi

Palestina yang berafiliasi dengan PLO. Sebelumnya, identitas nasional Yordania adalah ekspresi lokal dari proyek nasionalis anti-kolonial dan Arab yang lebih besar. Namun kini gagasan nasionalisme telah berkembang dan terbatas pada struktur negara yaitu pada struktur Yordania itu sendiri. Sehingga dengan berbagai dinamika yang muncul, gagasan nasionalisasi menghadapi persoalan. Hal ini wajar bagi suatu negara untuk membela kepentingan nasionalnya. Kehadiran pengungsi Palestina yang tinggal di Yordania tetap menjadi masalah besar dan menjadi salah satu pemicu bangkitnya nasionalisme di Yordania.⁹ Saat ini ada dua konsep nasionalisme Yordania, satu negara-sentris dan satu orang-sentris. Menariknya, bagaimanapun, dukungan suku memainkan peran penting dalam melanjutkan legitimasi negara dalam kedua kasus tersebut.

Dimana kecenderungan nasionalisme menitikberatkan pada rezim-loyal negara yang menekankan hubungan erat antara suku, negara, militer dan rezim Hashemite. Dalam hal ini, suku-suku ini penting terutama karena dinas militer dan kesetiaan mereka kepada raja. Pada saat yang sama, negara dan raja dalam tatanan ini sangat penting untuk mempersatukan rakyat Yordania. Sebaliknya, pandangan nasionalisme Yordania yang berpusat pada manusia melihat etnisitas sebagai titik awal dan akhir nasionalisme Yordania. Nasionalisme memainkan peran penting dalam menekan politik Yordania dalam menghadapi berbagai isu. Namun, ideologi itu merasuki akar rumput masyarakat Yordania, terutama di kalangan penduduk Tepi Timur. Di Tepi Timur, yang didominasi oleh komunitas etnis Yordania yang beragam, kebutuhan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip nasionalisme ke dalam kebijakan luar negeri terus ditekankan. Suatu argumen yang dikemukakan oleh Nasionalis Yordania bahwa korelasi atas Tepi Barat menumbuhkan ancaman atas kehidupan negara merdeka yakni Yordania. Ditambah anggapan kaum nasionalis dimana korelasi Yordania dan Tepi Barat adalah membunuh diri sendiri secara nasional. Kaum nasionalis Tepi Timur menyatakan diri sebagai pondasi negara dengan menganggap warga Palestina yang bermukim dinegaranya sebagai ancaman identitas negara. Sehingga menurut kaum nasionalis misi utamanya yakni menegakkan Yordania atas berbagai ancaman yang ada. Pada konteks ini kaum nasionalis berupaya menduduki pemerintahan khususnya mengambil tongkat terpenting pemerintahan, contohnya Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, dan lainnya.¹⁰

Perekonomian Yordania

Sebagai negara bekas jajahan kerajaan Inggris, Yordania sendiri termasuk negara dengan tingkat perekonomian yang relatif kecil dan menghadapi banyak kendala, namun relatif terdiversifikasi dengan baik. Gabungan perdagangan dan keuangan menyumbang hampir satu pertiga atas produk domestik bruto (PDB) Yordania antaranya komunikasi serta transportasi, utilitas public serta konstruksi mewakili satu perlima atas total PDB, dan manufaktur serta tambang merupakan proporsi yang hampir sama. Pengiriman uang dari Yordania kepada

para pekerja luar negeri adalah salah satu sumber utama devisa negara. Namun, meskipun ekonomi Yordania seolah-olah didasarkan pada perusahaan swasta, khususnya jasa namun pengeluaran pemerintah menyumbang sekitar seperempat dari PDB dan mempekerjakan sekitar sepertiga tenaga kerja. Selain itu, Yordania sejak pertengahan 1990-an diganggu oleh resesi, utang, dan pengangguran dan ukuran pasar Yordania yang kecil, fluktuasi produksi pertanian, kekurangan modal, serta yang tak kalah penting adalah keberadaan pengungsi dalam jumlah besar telah membuat Yordania perlu terus mencari bantuan asing. Pemerintah Yordania lambat dalam menerapkan privatisasi. Terlepas dari langkah Dana Moneter Internasional (IMF) serta Bank Dunia untuk mendorong sektor swasta, termasuk kesepakatan untuk menghapus utang luar negeri negara itu dan pinjaman dari Bank Dunia yang dirancang untuk merevitalisasi ekonomi Yordania. Baru pada tahun 1999 pemerintah mulai memperkenalkan sejumlah reformasi ekonomi. Upaya ini termasuk masuknya Yordania ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2000 dan privatisasi sebagian dari beberapa perusahaan milik negara.

Kondisi geografis yordania telah membuatnya dan ekonominya sangat rentan terhadap ketidakstabilan politik di wilayah tersebut. Ekonomi Yordania tangguh dan tumbuh sebelum Perang Enam Hari pada Juni 1967, dan Tepi Barat, sebelum pendudukannya oleh Israel selama konflik itu, menyumbang sekitar sepertiga dari total pendapatan domestik Yordania. Pertumbuhan ekonomi berlanjut setelah tahun 1967 dengan kecepatan yang lebih lambat tetapi direvitalisasi oleh serangkaian rencana ekonomi negara. Perdagangan meningkat antara Yordania dan Irak selama Perang Iran-Irak (1980-1988), karena Irak membutuhkan akses ke pelabuhan Al 'Aqabah Yordania. Yordania awalnya mendukung presiden Irak Saddam Hussein ketika Irak menduduki Kuwait selama Perang Teluk Persia, tetapi akhirnya menyetujui sanksi perdagangan PBB terhadap Irak, mitra dagang utamanya, dan dengan demikian menempatkan seluruh ekonominya dalam bahaya. Bantuan darurat eksternal membantu Yordania mengatasi krisis, dan ekonomi didorong oleh masuknya tiba-tiba warga Palestina dari Kuwait pada tahun 1991, banyak dari mereka membawa masuk modal. Selama tahun 2003 industri konstruksi pulih dengan kedatangan ribuan orang yang melarikan diri dari Irak, dan Yordania menjadi pusat layanan utama bagi mereka yang bekerja untuk membangun kembali negara itu. Terlepas dari dukungan pemerintah terhadap rencana IMF dan Bank Dunia untuk meningkatkan sektor swasta, negara tetap menjadi kekuatan dominan dalam perekonomian Yordania. Di bidang pertanian yordania mengimpor beberapa bahan makanan untuk memenuhi kebutuhannya. Gandum dan barley adalah tanaman utama di dataran tinggi tadah hujan, dan lahan irigasi di Lembah Yordan menghasilkan jeruk dan buah-buahan lainnya, kentang, sayuran (tomat dan mentimun), dan zaitun.

Sumber daya mineral termasuk deposit besar bagi yordania seperti fosfat, kalium, batu kapur, dan marmer, serta dolomit, kaolin, dan garam. Mineral yang lebih baru ditemukan termasuk barit (bijih utama dari elemen logam barium), kuarsit, gipsum (digunakan sebagai pupuk), dan feldspar, dan ada deposit tembaga, uranium, dan minyak serpih yang belum dieksploitasi. Meskipun negara ini tidak memiliki cadangan minyak yang signifikan, cadangan gas alam yang sederhana terletak di gurun timurnya. Pada tahun 2003 bagian pertama dari pipa baru dari Mesir mulai mengirimkan gas alam ke Al-‘Aqabah. Hampir semua tenaga listrik di Yordania dihasilkan oleh pembangkit termal, yang sebagian besar berbahan bakar minyak. Pembangkit listrik utama dihubungkan oleh sistem transmisi. Pada awal abad ke-21 pemerintah telah menyelesaikan program untuk menghubungkan kota-kota besar dan kota-kota besar dengan jaringan nasional. Dimulai pada dekade terakhir abad ke-20, akses ke air menjadi masalah utama bagi Yordania serta titik konflik di antara negara-negara di wilayah tersebut seperti penggunaan Sungai Yordan yang berlebihan (dan anak sungainya, Sungai Yarmūk) dan penggunaan berlebihan dari Sungai Yordan. Penyadapan akuifer alami di kawasan itu menyebabkan kekurangan di seluruh Yordania dan negara-negara sekitarnya. Pada tahun 2000 Yordania dan Suriah mendapatkan dana untuk membangun bendungan di Sungai Yarmūk yang selain menyimpan air untuk Yordania, juga akan menghasilkan listrik untuk Suriah. Pembangunan Bendungan Waḥdah (Persatuan) dimulai pada tahun 2004. Sumber daya dan kekuatan.¹¹

Pada bidang finansial dan juga perdagangan, Bank Sentral Yordania (Al-Bank al-Markazī al-Urdunī) mengeluarkan dinar, mata uang nasional. Ada banyak bank nasional dan asing selain lembaga kredit. Pemerintah telah berpartisipasi dengan perusahaan swasta dalam mendirikan perusahaan pertambangan, industri, dan pariwisata terbesar di negara ini dan juga memiliki bagian yang signifikan dari perusahaan terbesar. Bursa Efek Amman (Būrṣat Ammān; sebelumnya Pasar Keuangan Amman) merupakan sebuah pasar saham paling besar di Arab. Ekspor utama Yordania adalah pakaian, bahan kimia dan produk kimia, serta kalium dan fosfat; impor utama adalah mesin dan peralatan, minyak mentah, dan produk makanan. Sumber utama impor adalah Arab Saudi, Amerika Serikat, Cina, dan Uni Eropa (UE). Tujuan utama ekspor adalah Amerika Serikat, Irak, dan Arab Saudi. Pada tahun 2000 Yordania menandatangani perjanjian perdagangan bebas bilateral dengan Amerika Serikat. Nilai ekspor meningkat, tetapi tidak menutupi impor; defisit dibiayai oleh hibah luar negeri, pinjaman, dan bentuk lain dari transfer modal. Meskipun defisit perdagangan Yordania sangat besar, namun telah diimbangi oleh pendapatan dari pariwisata, pengiriman uang yang dikirim oleh orang Yordania yang bekerja di luar negeri, pendapatan dari investasi asing yang dilakukan oleh bank sentral, dan subsidi dari pemerintah Arab dan non-Arab lainnya.¹²

Pada awal 1980-an Yordania kehilangan banyak tenaga terampilnya ke negara-negara tetangga sebanyak 400.000 orang meninggalkan kerajaan itu. Namun permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memberikan peluang kerja yang lebih baik di Yordania sendiri dan pembatasan permintaan tenaga kerja asing oleh negara-negara Teluk Persia. Sekitar setengah dari pendapatan pemerintah berasal dari pajak. Meskipun pemerintah telah melakukan upaya besar untuk mereformasi pajak penghasilan, baik untuk meningkatkan pendapatan maupun untuk mendistribusikan kembali pendapatan, pendapatan dari pajak tidak langsung terus melebihi dari pajak langsung. Langkah-langkah pajak telah diadopsi untuk meningkatkan tingkat tabungan yang diperlukan untuk membiayai investasi, dan pemerintah telah menerapkan pembebasan pajak atas investasi asing dan atas transfer keuntungan dan modal asing. Transportasi dan telekomunikasi.¹³

Yordania memiliki jaringan jalan utama, sekunder, dan pedesaan, yang sebagian besar permukaannya keras. Sistem jalan raya pengelolaannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini, tidak hanya menghubungkan kota-kota besar tetapi juga menghubungkan kerajaan dengan negara-negara tetangga. Salah satu arteri lalu lintas utama adalah jalan raya Amman–Jarash–Al-Ramthā, yang menghubungkan Yordania dengan Suriah. Rute dari Amman melalui Ma‘ān ke pelabuhan Al-‘Aqabah adalah rute utama ke laut. Dari Ma‘ān, Desert Highway melewati Al-Mudawwarah, menghubungkan Yordania dengan Arab Saudi. Jalan raya Amman Yerusalem, melewati Nā‘ūr, adalah jalan utama turis. Kereta Api Hejaz-Yordania yang dioperasikan pemerintah membentang dari Dar‘ā di utara melalui Amman ke Ma‘ān di selatan. Perusahaan Kereta Api Aqaba mengoperasikan jalur selatan yang membentang ke pelabuhan Al-‘Aqabah dan menghubungkan ke Kereta Api Hijaz-Yordania di Baṭn al-Ghūl. Koneksi kereta api juga bergabung dengan Dar‘ā di utara dengan Damaskus, Suriah. Royal Jordanian adalah maskapai penerbangan resmi negara tersebut, yang menawarkan layanan di seluruh dunia. Bandara Internasional Queen Alia dekat Al-Jīzah, selatan Amman, dibuka pada tahun 1983. Amman dan Al-‘Aqabah memiliki bandara internasional yang lebih kecil. Pada tahun 1994 Yordania memperkenalkan program untuk mereformasi sistem telekomunikasinya. Jordan Telecommunications Corporation milik pemerintah, satu-satunya penyedia layanan, tidak dapat memenuhi permintaan atau menyediakan layanan yang memadai, khususnya di daerah pedesaan; itu diprivatisasi pada tahun 1997. Sejak itu, penggunaan telepon seluler menjamur, jauh melampaui penggunaan telepon standar. Selain itu, penggunaan internet telah berkembang secara dramatis.¹⁴

Yordania Sebagai Negara Berpendapatan Menengah Atas Dan Hubungannya Terhadap Indonesia

Yordania menjadi sebuah negara yang memiliki tingkat ekonomi paling kecil diantara berbagai negara di Timur Tengah. Negara ini tak mempunyai SDA yang

menopang pertumbuhan ekonomi. Pendapatan Domestik Bruto Yordania berjumlah US\$85.55M, dimana dengan pendapatan perkapita US\$12.300. Berbagai industri utama dalam perekonomian Yordania yakni TIK, pariwisata, farmasi, pupuk, pakaian, pengolahan minyak serta semen. Namun Yordania adalah contoh negara dengan pertumbuhan ekonomi cukup bagus. Ditunjukkan dari GNP perkapita menyentuh 6% per tahunnya, dimana peningkatan penduduk hamper setengahnya yakni antara 3,5%. Tumbuhnya ekonomi Yordania berasal dari pertanian serta SDA lain. Produk pertanian Yordania yakni buah zaitun, padi, sayur mayur, hingga buah. Disisi lain hasil SDA yang diolah Yordania yakni garam dan pospat, serta pengolahan hasil tambang berupa semen, plastic, tekstil, hingga prosesing produk makanan. Perkembangan Yordania hingga saat ini pada aspek ekonomi memperoleh pendapatan perkapita senilai \$3.500 di 2002. Adapun GNP menyentuh \$16 Biliyun di 2002, yang mana anggaran belanja Yordania hingga \$99,3 Biliyun di 1999.¹⁵

Menurut CIA World Factbook Yordania termasuk bagian dari negara dengan pasar yang mengalami pertumbuhan dengan ekonomi pasar yang bebas. Dengan begitu Yordania dianggap sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas. Yordania juga memiliki status maju/memimpin di Uni Eropa sejak Desember 2010 dan juga merupakan anggota Area Perdagangan Bebas Eropa dan Timur Tengah. Yordania memiliki lebih banyak perjanjian perdagangan bebas daripada negara lain mana pun di kawasan ini. Yordania, sebuah negara berpenghasilan menengah ke atas, telah membuat kemajuan yang signifikan dalam membangun lembaga negara, melestarikan toleransi dan pluralisme agama, memajukan ekonomi pertumbuhan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harapan hidup saat lahir meningkat dari 52,6 tahun pada tahun 1960 menjadi 74,3 pada tahun 2016. Produk domestik bruto per kapita meningkat dari \$511 pada tahun 1965 menjadi \$4.129 pada tahun 2017. Ketidakstabilan regional di perbatasan Yordania yang diakibatkan gejolak politik, ekstremisme kekerasan, ketegangan antara Israel dan Wilayah Palestina, dan arus masuk pengungsi terutama dari Irak dan Suriah telah membebani masyarakat Yordania dan berkontribusi pada domestic kegelisahan. Konflik di Suriah dan Irak menyebabkan masuknya lebih dari satu juta pengungsi, yang berkontribusi pada penggandaan populasi Yordania sejak tahun 2000 (menjadi 10 juta rakyat). Pertumbuhan populasi yang dramatis ini membebani pasar tenaga kerja, meningkatkan biaya hidup, dan secara signifikan mempengaruhi kualitas dan ketersediaan air, perawatan kesehatan, dan pendidikan.¹⁶

Perdagangan dengan Irak dan Suriah, mitra dagang utama bersejarah Yordania, tetap ada sangat dibatasi. Tantangan eksternal dan internal ini menghasilkan satu dekade rendah pertumbuhan yang meninggalkan negara dengan rasio utang terhadap PDB lebih dari 88 persen dan tingkat pengangguran untuk pemuda dan lulusan perguruan tinggi baru-baru ini hampir 50 persen dan 23 persen, masing-masing. Berbeda dengan Yordania, Indonesia masih ada

dalam kondisi Middle Income Trap. Salah satu pengaruh mengapa Indonesia masih dalam kondisi tersebut adalah karena Indonesia belum mampu mencapai target pertumbuhan PDB per kapita 14,8% per tahun selama tahun 2011-2013. Pertumbuhan Indonesia hanya 4,86% per tahun. Tahun 2013 merupakan tenggat waktu minimal bagi Indonesia untuk memantapkan diri sebagai negara berpendapatan menengah. Selain itu, berdasarkan hasil dan analisis selama 45 tahun, dapat disimpulkan bahwa perubahan ekspor barang dan jasa, nilai tambah pertanian dan bantuan dan bantuan luar negeri (dengan atau tanpa penundaan) memiliki dampak negatif yang signifikan. PDB per kapita. Variabel investasi bruto memiliki pengaruh positif (tahun berjalan) dan negatif (2 dan 3 tahun terakhir) terhadap GNP per kapita tahun berjalan. Variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB per kapita.¹⁷

Selain itu, hubungan antara Yordania dengan Indonesia terhubung melalui kerja sama Perjanjian ekonomi bilateral antar negara didasarkan pada Agreement on Economic and Commercial Cooperation yang ditandatangani pada 3 April 1986. Berdasarkan kesepakatan tersebut, dibentuk komite bersama sebagai forum resmi untuk membahas upaya peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan antar negara. Meskipun Yordania yang berpenduduk kurang lebih 9,5 juta jiwa bukanlah tujuan akhir ekspor produk Indonesia karena lokasinya yang strategis di kawasan Timur Tengah dan hubungan bilateral yang erat dengan AS dan UE, Yordania merupakan pintu gerbang ekspor Indonesia ke Irak, Suriah, Palestina, Mesir, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Hubungan diplomatik antara Yordania dan Indonesia dimulai pada tahun 1950, sedangkan kedutaan Indonesia di Amman dibuka pada tahun 1985 dan Yordania membuka kedutaannya di Jakarta pada November 1986. Hubungan Indonesia-Yordania berkembang dengan baik dan tidak ada ganjalan bagi kedua negara dalam meningkatkan hubungan persahabatan. Puncak hubungan persahabatan kedua negara ditandai dengan kunjungan kenegaraan Raja Hussein dan Ratu Noor ke Indonesia, 1-6 April 1986, dan kunjungan kenegaraan balasan Presiden Soeharto ke Yordania, 11-14 November 1996 yang mendapat sambutan hangat dari rakyat Yordania. Selanjutnya, Raja Abdullah II dan Ratu Rania juga telah melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia, 12-13 Oktober 2005, yang dibalas dengan kunjungan kenegaraan pula oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Yordania, 2-3 Mei 2006.¹⁸

Tidak seperti negara-negara tetangga di Timur Tengah, Yordania jarang sekali mendapat banyak perhatian karena merupakan satu-satunya kawasan yang tidak mengalami peristiwa Arab Spring di tahun 2011 dan menjadi negara yang selalu stabil dalam aspek politik. Tidak hanya itu, Yordania juga berbatasan dengan beberapa negara yang terkena dampak konflik seperti Irak, Israel, dan Suriah serta tidak memiliki kekayaan sumber daya alam, baik minyak maupun air, seperti kebanyakan negara Timur Tengah. Dalam dinamika kawasan itu sendiri, Yordania tidak pernah mengalami konflik besar dengan negara lain. Ia

bahkan menjadi salah satu dari dua negara yang berani menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Yordania juga menjadi salah satu anggota pendiri Organisasi Kerjasama Islam dan Liga Arab. Yordania mengalami kerugian besar pasca kalah dalam perang Arab, terutama dalam hal ekonomi. Itulah salah satu alasan Yordania menandatangani perjanjian damai dengan Israel, yaitu untuk menyelamatkan Yordania dari resesi ekonominya pada masa itu. Dimulai dengan bantuan Amerika Serikat sebagai syarat perjanjian damai dengan Israel, bantuan negara-negara Arab dan negara-negara Teluk Persia untuk membuka pasar bebas yang membantu Yordania memperluas pasarnya ke Eropa, dan pembukaan kerjasama dengan negara lain yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan perekonomian Yordania.

Kesimpulan

Nasionalisme menjadi ideologi yang rumbuh dan berkembang di Yordania dimana memunculkan banyak sekali kejadian geopolitik serta keinginan nasionalisme Arab. Nasionalisme kemudian menjadi sebuah dorongan utama guna menumbuhkan kembangkan identitas nasional Yordania. Sebelumnya identitas nasional Yordania adalah ekspresi lokal dari proyek nasionalis anti-kolonial. Nasionalisme memainkan peran penting dalam menekan politik Yordania dalam menghadapi berbagai isu. Ideologi ini berkembang di basis masyarakat Yordania, khususnya di wilayah Tepi Timur yang didominasi oleh berbagai suku asli Yordania, yang selalu menekankan bahwa prinsip nasionalisme harus dimasukkan ke dalam formula politik eksternal Yordania. Sebagai negara bekas jajahan kerajaan Inggris, Yordania sendiri termasuk negara dengan tingkat perekonomian yang relatif kecil dan menghadapi banyak kendala. Selain itu, Yordania sejak pertengahan 1990-an diganggu oleh resesi, utang, dan pengangguran dan ukuran pasar Yordania yang kecil, fluktuasi produksi pertanian, kekurangan modal, serta yang tak kalah penting adalah keberadaan pengungsi dalam jumlah besar telah membuat Yordania perlu terus mencari bantuan asing. Kondisi geografis Yordania juga telah membuat ekonominya sangat rentan terhadap ketidakstabilan politik. Ekonomi Yordania tangguh dan tumbuh sebelum Juni 1967, dan Tepi Barat, sebelum pendudukannya oleh Israel selama konflik itu, menyumbang sekitar sepertiga dari total pendapatan domestik Yordania.

Pertumbuhan ekonomi Yordania yang relatif baik tercermin dari PDB per kapita yang mencapai 6% per tahun, sedangkan pertumbuhan penduduk hampir setengahnya menjadi sekitar 3,5%. Pertumbuhan ekonomi Yordania berasal dari produk pertanian dan sumber daya alam lainnya. Yordania diklasifikasikan sebagai negara berkembang dengan ekonomi pasar bebas dan karena itu dianggap sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas. Yordania memiliki lebih banyak perjanjian perdagangan bebas daripada negara lain mana pun di kawasan ini. Yordania telah membuat kemajuan yang signifikan sehingga mampu menjadi sebuah negara berpenghasilan menengah ke atas.

Endnote

- ¹ Satloff, R. (1986). *Troubles on the East Bank: Challenges to the domestic stability of Jordan*. New York: Praeger.
- ² Oudat, M. A., & Alshboul, A. (2010). —Jordan First||: Tribalism, Nationalism and Legitimacy of Power in Jordan. *Intellectual Discourse*, Vol. 18, No. 1, 65-96.
- ³ Okar, E. M. (2001). The decline of Jordanian political parties: Myth or reality? *International Journal of Middle East Studies* 33(04), 545-569.
- ⁴ Yom, S. L. (2014). The New Landscape of Jordanian Politics: Social Opposition, Fiscal Crisis, and the Arab Spring. *British Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 42, No. 3, 284-300.
- ⁵ Ibid.,
- ⁶ Malale, A., & Maung, A. S. (2014). Analisis middle-income trap di Indonesia. *Jurnal BPPK*, 7(2), 91-110.
- ⁷ Yom, S. L. (2014). The New Landscape of Jordanian Politics: Social Opposition, Fiscal Crisis, and the Arab Spring. *British Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 42, No. 3, 284-300.
- ⁸ Jordan, U. S. A. I. D. (2013). *Country Development Cooperation Strategy (CDCS)*. Lynch, M. (1998). *Jordan"s Competing Nationalisms: Deliberation, Transition and Theories of Ethnic Conflict*. Middle East Studies Association.
- ⁹ Hadi, A., Ahmad, Omar, & Bahjat. (2016). *Nationalism in the Middle East: The development of Jordanian national identity since the disengagement of 1988*. Durham: Durham University.
- ¹⁰ Fanack.com. (2018, Oktober 30). *Governance & Politics of Jordan*.
- ¹¹ *Country Profile: Jordan 1995-96*. London: The Economist Intelligence Unit, 1995.
- ¹² Brown, N. J. (2006). *Jordan And Its Islamic Movement: The Limits of Inclusion?* Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- ¹³ Brand, Laurie. *Jordan's Inter-Arab Relations: The Political Economy of Alliance Making*. New York: Columbia University Press, 1994.
- ¹⁴ <https://www.iemed.org/publication/jordan-negotiating-political-economic-and-social-minefields/>
- ¹⁵ Ibid.,
- ¹⁶ Barari, H. A. (2014). *Jordan and Israel: A Troubled Relationship in a Volatile Region*. Amman: Friedrich Ebert Stiftung Jordan & Iraq.
- ¹⁷ Brown, N. J. (2006). *Jordan And Its Islamic Movement: The Limits of Inclusion?* Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- ¹⁸ Fanack.com. (2018, Oktober 30). *Governance & Politics of Jordan*.

Daftar Pustaka

- <https://www.iemed.org/publication/jordan-negotiating-political-economic-and-social-minefields/>
- Barari, H. A. (2014). *Jordan and Israel: A Troubled Relationship in a Volatile Region*. Amman: Friedrich Ebert Stiftung Jordan & Iraq.
- Brand, Laurie. *Jordan's Inter-Arab Relations: The Political Economy of Alliance Making*. New York: Columbia University Press, 1994.
- Brown, N. J. (2006). *Jordan And Its Islamic Movement: The Limits of Inclusion?* Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace.
- Country Profile: Jordan 1995-96*. London: The Economist Intelligence Unit, 1995.
- Fanack.com. (2018, Oktober 30). *Governance & Politics of Jordan*.

-
- Hadi, A., Ahmad, Omar, & Bahjat. (2016). *Nationalism in the Middle East: The development of Jordanian national identity since the disengagement of 1988*. Durham: Durham University.
- Jordan, U. S. A. I. D. (2013). *Country Development Cooperation Strategy (CDCS)*.
- Lynch, M. (1998). *Jordan's Competing Nationalisms: Deliberation, Transition and Theories of Ethnic Conflict*. Middle East Studies Association.
- Malale, A., & Maung, A. S. (2014). Analisis middle-income trap di Indonesia. *Jurnal BPPK*, 7(2), 91-110.
- Okar, E. M. (2001). The decline of Jordanian political parties: Myth or reality? *International Journal of Middle East Studies* 33(04), 545-569.
- Oudat, M. A., & Alshboul, A. (2010). —Jordan First||: Tribalism, Nationalism and Legitimacy of Power in Jordan. *Intellectual Discourse*, Vol. 18, No. 1, 65-96.
- Satloff, R. (1986). *Troubles on the East Bank: Challenges to the domestic stability of Jordan*. New York: Praeger.
- Yom, S. L. (2014). The New Landscape of Jordanian Politics: Social Opposition, Fiscal Crisis, and the Arab Spring. *British Journal of Middle Eastern Studies*, Vol. 42, No. 3, 284-300.